



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT (STUDI KASUS PARIWISATA *STONE GARDEN* DESA GUNUNG MASIGIT KECAMATAN CIPATAT)

Selly Anggraeni¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus *Stone Garden* Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat). Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah sebagai dasar pengelolaan pariwisata, termasuk objek wisata *Stone Garden*. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Dinas Kepariwisataan Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Desa Gunung Masigit, pengelola wisata (POKDARWIS), dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata *Stone Garden* telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek komunikasi kebijakan dan keterlibatan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala pada koordinasi antarorganisasi, keterbatasan sumber daya, serta sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Pariwisata; *Stone Garden*; Pemerintah Daerah

Abstract

This research examines the implementation of local government policy in tourism management in West Bandung Regency, focusing on Stone Garden Tourism in Gunung Masigit Village, Cipatat District. Tourism is a strategic sector in regional development

that contributes to community welfare and environmental sustainability. The West Bandung Regency Government has established Regional Regulation Number 7 of 2013 as the legal basis for tourism management. However, several challenges remain in its implementation. This study applies the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, which includes policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, implementers' attitudes, inter-organizational communication, and social, economic, and political environments. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation involving local government officials, tourism managers (POKDARWIS), and the surrounding community. The findings indicate that the implementation of tourism management policy at Stone Garden has been relatively effective, particularly in policy communication and community involvement. Nevertheless, limitations in resources, inter-organizational coordination, and supporting facilities remain obstacles. Therefore, stronger stakeholder synergy is required to achieve more optimal and sustainable tourism management.

Keywords: Policy Implementation; Tourism Management; Stone Garden; Local Government

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu potensi yang kini banyak digali dan dikembangkan di berbagai negara. Ada peningkatan kecenderungan pasar pariwisata internasional untuk berwisata dikawasan di kawasan yang masih alami. Kecenderungan ini memberi peluang bagi pengembangan pariwisata Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan keanekaragaman hayati, memiliki panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan 17.504 pulau, yang dimana 10.000 pulau diantaranya merupakan pulau-pulau kecil, bahkan sangat kecil, belum bernama dan tidak berpenghuni. Pulau-pulau kecil memiliki potensi dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dalam bentuk wisata Bahari (*marine tourism*) ataupun ekowisata (*ecotourism*) (Qodriyatun, 2019)

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdapat 21,93 juta orang yang bekerja di sektor pariwisata sehingga membuat sektor tersebut sebagai penyumbang tenaga kerja terbesar keempat dari total jumlah pekerja di seluruh Indonesia. Kunjungan wisatawan mancanegara juga terus meningkat dari tahun ke tahun dilihat dari 3 tahun terakhir seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia

No	Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara
1	2022	5.889.031
2	2023	11.677.825
3	2024	13.902.420
	Rata-rata Pertumbuhan(%)	20,28%

Sumber : Badan Pusat statistik (2025)

Terlihat bahwa wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun ditunjukkan dengan laporan statistik yang diberikan oleh BPS menunjukkan bahwa banyaknya minat wisatawan Mancanegara terhadap kepariwisataan alam di Indonesia. Sektor pariwisata dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Peringkat daya saing pariwisata Indonesia terus meningkat hingga peringkat 22 dari 119 negara. Berdasarkan siaran pers yang dibagikan dalam web Kemenparekraf, 21 Mei 2024. (Rusmianely, 2024)

Perkembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai percepatan pengembangan destinasi wisata di Indonesia. Berbagai Langkah telah dilakukan oleh pemerintah yang antara lain melalui pembentukan sekretariat Bersama percepatan pengembangan destinasi wisata Indonesia. Berbagai Langkah telah dilakukan oleh pemerintah pusat yang antara lain melalui pembentukan sekretariat bersama percepatan pengembangan pariwisata, pengembangan berbagai infrastruktur penunjang sektor pariwisata, pengembangan atraksi wisata, meningkatkan kualitas amenities di daerah destinasi wisata.

Tak kalah dengan ketenaran pariwisata ruang lingkup Indonesia, Jawa Barat sendiri juga memiliki ciri khas yang kaya akan wisata kekayaan alam, perlu diketahui pesona Jawa Barat mempunyai banyak destinasi wisata yang bervariasi dengan berbagai keunikannya. Berdasarkan data yang ada, Jawa Barat memiliki destinasi wisata alam sebanyak 1.436, wisata budaya 585, dan wisata buatan 758 serta keindahan gunung, laut, dan cekungan alam

yang dapat memberikan pengalaman unik disetiap penyelenggaraan *event* yang berbeda tempat. (Purwadi, 2024)

Berbicara perihal kawasan *karst* Kabupaten Bandung Barat sendiri memiliki daya tarik sendiri terhadap pariwisata alam yang disajikan. Seperti beberapa wisata alam dengan keindahan tebing, sungai, dan goa *karts* yang disajikan. Diantaranya adalah *Stone Garden*, Gua Pawon, Tebing Citatah, dan Gunung Hawu/Pabeasan merupakan beberapa keindahan pariwisata alam yang disajikan pada kawasan *karst* di Kabupaten Bandung Barat itu sendiri.

Salah satu wisata yang menjadi pusat perhatian adalah *Stone Garden*. *Stone Garden* adalah destinasi wisata alam yang terletak di kawasan karst Citatah, Kabupaten Bandung Barat. Tempat ini menjadi pilihan tepat bagi wisatawan yang menyukai aktivitas outdoor dan petualangan. Seperti namanya, *Stone Garden* merupakan hamparan bebatuan dengan formasi alami yang unik, menciptakan panorama taman batu yang eksotis. Keunikan ini menjadikannya salah satu objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi, sebagaimana disebutkan dalam laporan 6 Destinasi Wisata Petualangan Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Terletak di Kampung Girimulya, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, *Stone Garden* bukan hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga memberikan wawasan tentang sejarah geologi bumi. Kawasan ini terbentuk sejak zaman Miosen, sekitar 20-30 juta tahun lalu, ketika dataran tinggi ini masih berupa laut dangkal yang kemudian mengalami proses alami hingga menjadi daratan berbatu. Dengan ketinggian sekitar 709 meter di atas permukaan laut, *Stone Garden* berada di puncak Bukit Pasir Pawon dan dikelilingi lembah-lembah dangkal yang menambah pesonanya.

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam dan budaya,

telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum dan pedoman dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dalam konteks perubahan besar tersebut lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang strategis bagi pemerintah untuk memasarkan potensi wisatanya, oleh karenanya kebijakan pariwisata sangat strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral, keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri. Pertimbangan keterkaitan antar sektor dan penanganan pariwisata semakin rumit dalam pengembangan suatu destinasi yang terpadu. (Mariane, 2022)

Tabel 1. 2 Tingkat Kunjungan Wisatawan Stone Garden

No	Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan
1	2020	127.171
2	2021	77.697
3	2022	104.665

Diolah : Peneliti (2025)

Dilihat dari perkembangan pariwisata *Sone Garden* terjadi naik dan turun kunjungan wisatawan disebabkan fluktuasi faktor situasi ekonomi global seperti terjadinya pandemi covid-19 yang melanda seluruh indonesia mengakibatkan seluruh masyarakat indonesia harus isolasi mandiri dan tidak diperbolehkan berkunjung hingga pandemi berakhir. Namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan pengunjung kembali namun, tidak seperti pada tahun 2020 dikarenakan terjadi proses penyesuaian kembali. Dalam fluktuasi tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pariwisata secara berdaya gunu, berhasil guna, dan berdaya saing. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan pariwisata di daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, koordinasi antar lembaga, keterlibatan masyarakat, hingga aspek sumber daya manusia dan

infrastruktur. Studi kasus di *Stone Garden*, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kebijakan pemerintah daerah diimplementasikan dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis alam dan budaya. *Stone Garden* dikenal sebagai kawasan wisata geologi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, namun masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaannya, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya promosi, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat lokal.

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami proses implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan pengelolaan pariwisata. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana.

Stone garden memiliki Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dengan tujuan utama yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi wisata lokal, mendorong partisipasi dalam pengelolaan wisata lokal, dan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama (*community-based tourism*). Dengan demikian bahwasanya POKDARWIS merupakan warga lokal yang ikut serta dalam pengelolaan pariwisata *Stone Garden*.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan *Stone Garden* adalah kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat lokal. Padahal, menurut Van Meter dan Van Horn (1975) komunikasi dan koordinasi antar organisasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, infrastruktur, maupun sumber daya manusia, juga menjadi kendala dalam pengembangan destinasi wisata ini. Hal ini diperkuat oleh temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa fasilitas pendukung di *Stone Garden* masih minim, promosi wisata belum optimal, dan pelatihan bagi masyarakat lokal sebagai pelaku wisata masih terbatas.

Selain aspek internal, faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Kabupaten Bandung Barat juga turut mempengaruhi

implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata. Van Meter dan Van Horn(1975), menegaskan bahwa lingkungan eksternal dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam proses implementasi kebijakan. Dalam kasus *Stone Garden*, dinamika sosial masyarakat, tingkat pendidikan, serta pola kepemilikan lahan menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata. Selain itu, dukungan politik dari pemerintah daerah dan komitmen para pemangku kepentingan juga sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan solusi yang rasional dan berbasis pada analisis yang komprehensif. Salah satu solusi yang dapat diupayakan adalah penguatan koordinasi antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi wisata dan pengelolaan destinasi juga menjadi langkah strategis yang dapat dilakukan. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata di *Stone Garden* harus didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan pariwisata *Stone Garden* Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kecamatan Cipatat, karena instansi tersebut berperan sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan pariwisata menjadi fokus utama penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang memahami dan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata *Stone Garden* Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, kepala Bidang

Kepariwisata, Kepala Desa Gunung Masigit, Perangkat Desa Gunung Masigit, Ketua POKDARWIS Desa Gunung Masigit, Masyarakat Desa Gunung Masigit yang terdampak kebijakan. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan mencakup tiga tahapan, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik karena menentukan sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan dalam praktik. Dalam konteks pengelolaan pariwisata daerah, implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah pada pengelolaan objek wisata Stone Garden di Desa Gunung Masigit dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif standar dan sasaran kebijakan pengelolaan pariwisata telah dirumuskan dengan jelas oleh Dinas Kepariwisata Kabupaten Bandung Barat dan dipahami oleh aktor pelaksana utama, yaitu pemerintah desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Sosialisasi kebijakan dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, serta forum koordinasi. Namun demikian, pada tingkat masyarakat, pemahaman terhadap sasaran kebijakan masih belum merata. Masyarakat cenderung terlibat secara operasional dalam kegiatan pariwisata, tetapi belum sepenuhnya memahami tujuan dan arah kebijakan secara konseptual. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar kebijakan yang ditetapkan dengan pemahaman kelompok sasaran, sehingga

berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan wisata.

2. Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, pengelolaan wisata Stone Garden didukung oleh potensi sumber daya alam yang besar serta ketersediaan sarana dan prasarana dasar. Namun, penelitian menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama, baik dari segi jumlah maupun kompetensi pengelola. Sarana pendukung seperti fasilitas sanitasi dan tempat ibadah juga belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan kepariwisataan. Ketergantungan pada sumber daya manusia lokal, khususnya Pokdarwis, menyebabkan pelayanan dan pengawasan kawasan wisata menjadi kurang optimal pada saat terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya yang memadai.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana dalam pengelolaan wisata Stone Garden melibatkan Dinas Kepariwisataan, pemerintah desa, Pokdarwis, dan lembaga desa lainnya. Struktur kelembagaan telah terbentuk dengan pembagian peran yang relatif jelas, di mana pemerintah desa berperan sebagai koordinator dan pengawas, sedangkan Pokdarwis sebagai pelaksana teknis. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan masih cenderung terpusat pada aktor tertentu, sehingga keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya terlembagakan secara formal. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan berjalan, tetapi belum optimal dari sisi partisipasi dan keberlanjutan organisasi.

4. Sikap atau Disposisi Pelaksana

Sikap para pelaksana kebijakan secara umum menunjukkan komitmen yang positif terhadap pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah, pemerintah desa, dan Pokdarwis memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian menemukan bahwa respon terhadap aspirasi masyarakat masih dinilai lambat dan kurang konsisten. Keterbatasan kapasitas dan koordinasi

menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas disposisi pelaksana dalam mewujudkan tujuan kebijakan.

5. Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi antarorganisasi dalam implementasi kebijakan pariwisata Stone Garden telah berlangsung secara formal dan berjenjang melalui rapat koordinasi, pembinaan, dan forum desa. Pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara Dinas Kepariwisata dan Pokdarwis. Meskipun demikian, penyampaian informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya merata. Informasi terkait kegiatan wisata dan aturan pengelolaan sering kali hanya diterima oleh kelompok tertentu, sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman kebijakan di tingkat masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih inklusif. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik secara umum mendukung implementasi kebijakan pengelolaan wisata Stone Garden. Keberadaan wisata memberikan dampak ekonomi positif berupa peningkatan pendapatan dan peluang kerja bagi masyarakat. Secara sosial dan politik, partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa dan penyampaian aspirasi juga meningkat. Namun, penelitian menemukan adanya tantangan berupa perbedaan kepentingan antarwarga dan ketimpangan dalam pemerataan manfaat ekonomi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dikelola secara partisipatif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata *Stone Garden* di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan, namun belum sepenuhnya optimal. Dari aspek sasaran kebijakan, aktor pelaksana utama seperti Dinas Kepariwisata, pemerintah desa, dan Pokdarwis pada umumnya telah memahami tujuan kebijakan melalui mekanisme koordinasi dan sosialisasi.

Namun, pemahaman masyarakat sebagai kelompok sasaran belum merata, sehingga partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan masih terbatas. Dari sisi sumber daya, pengelolaan pariwisata didukung oleh potensi sumber daya alam dan ketersediaan sarana prasarana dasar, tetapi keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, masih menjadi kendala utama dalam pencapaian standar pelayanan kepariwisataan. Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan bahwa struktur kelembagaan telah terbentuk dengan pembagian peran yang relatif jelas antara pemerintah daerah, pemerintah desa, Pokdarwis, dan lembaga desa. Meskipun demikian, efektivitas organisasi, khususnya Pokdarwis sebagai pelaksana teknis, masih memerlukan penguatan kapasitas. Dari aspek sikap atau disposisi pelaksana, seluruh aktor menunjukkan komitmen positif terhadap pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat, namun keterbatasan sumber daya menyebabkan komitmen tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Selain itu, komunikasi antarorganisasi telah berlangsung secara formal dan berjenjang, dengan pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara Dinas Kepariwisata dan Pokdarwis. Akan tetapi, efektivitas komunikasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman kebijakan. Sementara itu, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik secara umum mendukung implementasi kebijakan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, peluang kerja, serta partisipasi sosial dan politik. Di sisi lain, dinamika sosial berupa perbedaan kepentingan antarwarga masih menjadi tantangan yang perlu dikelola secara partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan komunikasi dan koordinasi antarorganisasi, serta pemerataan pemahaman dan manfaat pariwisata di tingkat masyarakat merupakan faktor kunci yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata *Stone Garden* di Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2013, juli 16). *Perda Kabupaten Bandung Barat No.7 Tahun 2013* .
Diambil kembali dari Database Peraturan BPK :
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/70042/perda-kab-bandung-barat-no-7-tahun-2013>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. I L. J. Moleong,
Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qodriyatun, S. N. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa. *Jurnal Masalah Sosial*.
- Rusmianely. (2024). *Indonesia masuk 30 besar daftar WEF 2024, negara dengan indeks pariwisata terbaik dunia* . www.liputan6.com .
- Sugiyono. (2017). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Purwadi, E. (2024). *kekayaan wisata jabar: hebat euy! jabar miliki 1.436 destinasi wisata alam dan 585 tempat wisata budaya*. *ideJabar*,
<https://idejabar.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-3528431709/kekayaan-wisata-jabar-hebat-euy-jabar-miliki-1436-destinasi-wisata-alam-dan-585-tempat-wisata-budaya?page=all#:~:text=HEBAT%20EUY%20!%20Jabar%20Miliki%201.436%20Destinasi>.